

## **KETERCAPAIAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN PADA SMK PERTANIAN DI PROVINSI DIY**

### ***ACHIEVEMENT OF THE NATIONAL EDUCATION STANDARDS IN AGRICULTURAL VOCATIONAL SCHOOL IN PROVINCE OF DIY***

Ichlasul Amal

Filsafat dan Sosiologi Pendidikan, Kebijakan Pendidikan FIP UNY

[ichlasul.amal2016@student.uny.ac.id](mailto:ichlasul.amal2016@student.uny.ac.id)

#### **Abstrak**

Penelitian ketercapaian standar nasional pendidikan pada SMK pertanian di Provinsi D.I. Yogyakarta bertujuan untuk mengetahui ketercapaian standar nasional pendidikan pada SMK pertanian di Provinsi D.I. Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Tempat penelitian dilakukan di Provinsi D.I. Yogyakarta. Jumlah populasi dan sampel sama yaitu sebanyak 12 sekolah SMK Pertanian. Teknik pengumpulan data menggunakan angket instrumen akreditasi dari BAN-SM Tahun 2019. Teknik analisa data menggunakan statistik deskriptif dengan metode penyajian gambar dan tabel. Hasil dari penelitian ini adalah Skor capaian rata-rata seluruh standar pada semua sekolah sebesar 83,9 maka telah melampaui kriteria minimal yang ditetapkan yaitu 80. Sehingga hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan dan hipotesis penelitian terbukti

**Kata Kunci :** *Ketercapaian, Standar Nasional Pendidikan, SMK Pertanian*

#### **Abstract**

*This study with the title of the achievement of the national education standards in agricultural vocational schools in the Special Region of Yogyakarta province aims to determine the achievement of national education standards in agricultural vocational schools in the province of Yogyakarta. This study is a descriptive quantitative research. This study was conducted in the Special Region of Yogyakarta province. The population and sample are the same, namely as many as 12 agricultural vocational school. The retrieval data used an accreditation instrument from BAN-SM 2019. The data analysis technique used descriptive statistics with the method of presenting graphs and tables. The results of the study are The average achievement score of all standard in all schools is 83,9 which has exceeded the minimum criteria set namely 80. So the study result show that the aims and hypotheses are proven*

**Keywords:** *Achievement, National Education Standards, Agricultural Vocational High School*

#### **PENDAHULUAN**

Ditengah berbagai pembangunan yang telah gencar dilakukan masih banyak terjadi kesenjangan yang amat mencolok dalam dunia pertanian, mulai dari masalah pemodal besar yang menindas para petani sekala kecil, permainan bibit

dan pupuk oleh korporasi. Sistem yang ada sekarang masihlah belum memungkinkan kesejahteraan petani jika dilihat dari rendahnya daya tawar petani (Mahudin & Shabahati, 2017:4). Masalah yang kini dihadapi mempunyai implikasi yang panjang karena telah menyebabkan berbagai masalah pada bidang pertanian.

Dilihat dari kuantitas petani dan sebaran umur petani saja pada sensus pertanian 2013 jumlah rumah tangga pertanian menurun 5 juta rumah tangga sejak 2003 dari mulai 31 juta menjadi 26 juta saja, dilihat dari sebaran umur petani 50% (14.210,64) berada pada rentang umur 34-50 tahun dan 30% (8.51,44) pada rentang umur di atas 54 tahun sisanya 12,87% (3.362,88) berumur di bawah 34 tahun (Bappenas, 2014:25). Melihat data yang ada dapat diprediksikan bahwa indonesia akan mengalami krisis regenerasi petani muda. Pada kenyataannya peran sentral pertanian dalam ketahanan pangan negara dapat dibuktikan melalui beberapa riset yang telah dilakukan, bahwa dampak krisis petani muda ini akan mengganggu stabilitas negara (Suratha, 2015:68).

Masalah Krisis petani muda merupakan masalah yang kompleks tetapi setidaknya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan krisis petani muda terjadi, menurut kajian yang dilakukan oleh tim peneliti DPR RI terdapat sekurangnya ada tiga faktor utama yang menyebabkan krisis ini (Mahudin & Shabahati, 2017:6-7), pertama adalah generasi muda lebih memilih urbanisasi, Dalam rumah tangga pertanian indonesia survei menunjukkan bahwa anak petani kebanyakan tidak memilih melanjutkan pekerjaan pertaniannya tetapi memilih untuk melakukan urbanisasi. Kedua adalah

SDM lulusan pertanian tidak memilih sektor pertanian dilihat dari data yang ada bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang di tempuh semakin sedikit yang terjun dalam dunia pertanian. Ketiga adalah kurangnya kualitas pendidikan vokasional di indonesia dalam bidang pertanian , dibuktikan dengan kurang beragamnya jurusan SMK yang dibuka di seluruh indonesia dan belum dikembangkan secara baik.

Format pendidikan pertanian secara formal pada jenjang menengah adalah SMK, sebagai lembaga pendidikan yang mengajarkan kemampuan teknik atau vokasional dalam berbagai bidang di jenjang menengah. SMK PP (Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian) atau yang sering disebut sebagai SMK dengan jurusan yang berkaitan dengan pertanian, peternakan, perikanan dan kemaritiman sebagai garda terdepan pendidikan petani muda di indonesia.

Sebagai garda terdepan pendidikan petani muda masihlah terjadi berbagai masalah dalam jenjang pendidikan ini, problem kualitas pendidikan masihlah menjadi yang utama dibuktikan dari berbagai penelitian yang ada tentang gambaran kualitas pendidikan di indonesia, menunjukkan bahwa 75% layanan pendidikan belum memadai dan dilihat dari aspek mutu dan akses pendidikan pada tahun 2013 -2014 peringkat indonesia berada pada

nomor 40 dari 40 negara yang diteliti (Widodo, 2015:301). Pada konteks sekolah menengah kejuruan musti dilihat pula bagaimana pendidikan dapat menciptakan SDM yang unggul dan siap kerja. Tetapi pada kenyataannya menurut survei BPS per agustus 2019 masih banyak pengangguran di Indonesia, angka paling besar ditunjukkan oleh lulusan jenjang SMK sebesar 10,42 % (Midayanti, 2019:3). Hasil riset menunjukkan setidaknya ada 4 faktor yang mendorong, pertama adalah trend jumlah penduduk indonesia yang terus meningkat, kedua adalah jumlah angkatan kerja selalu lebih ketimbang lapangan pekerjaan, ketiga adalah masalah persebaran penduduk yang kurang merata terpusat pada satu wilayah saja, keempat adalah tidak sesuainya antara kualifikasi sumber daya manusia dengan kebutuhan dunia kerja (Widodo, 2015:301-302). Poin penting yang dapat diambil adalah bagaimana kualitas pembangunan sumber daya manusia secara maksimal sesuai dengan harapan yang ditetapkan, tentunya hal ini langsung berkaitan dengan bagaimana lembaga lembaga pendidikan menjaga kualitasnya secara menyeluruh.

Pembahasan kualitas tak bisa dilepaskan dari bagaimana sistem yang menjamin kualitas pendidikan di indonesia. Sistem yang dirumuskan dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005

sebagai dasar pelaksanaan standarisasi pendidikan, yang kini telah direvisi menjadi peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013 dan kembali direvisi menjadi peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2015, terdapat beberapa pengembangan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman maka kembali ditegaskan dalam peraturan menteri nomor 39 tahun 2018 secara spesifik mengatur mengenai penyesuaian standarisasi dengan program program pembangunan SMK yang sering disebut program revitalisasi SMK. Pemerintah mengamanahkan tanggungjawab standarisasi pada Badan Standarisasi Nasional Pendidikan Indonesia dilandasi atas perubahan peraturan terbaru pada peraturan menteri 13 Tahun 2015, yang membawa implikasi perubahan struktur dan kultur yang di inginkan, salah satunya implikasi pada tingkat daerah peran lembaga penjaminan mutu pendidikan sebagai lembaga tersendiri yang membantu asesor (Malik dkk., 2019:39).

Produk gagasan untuk menjaga kualitas pendidikan indonesia dituangkan dalam 8 standar pendidikan diatur dalam PP 13 Tahun 2015, standar yang pertama adalah standar kompetensi lulusan, selanjutnya secara berurutan adalah standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan serta standar penilaian. Kedelapan

standar ini diukur dengan berbagai rangkaian cara yang secara nasional telah ditetapkan prosesnya, serta penggunaan instrumen baku yang sering disebut sebagai instrumen akreditasi sebagai tolak ukur ketercapaian kedelapan standar tersebut.

Sebuah penelitian yang dilakukan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan jika ketercapaian standar pendidikan SMK dilihat dari skor instrumen akreditasi BSNP tahun 2009, dari delapan standar rata-rata semuanya masihlah di bawah 69 % (Soeharto, 2012:27). Dengan capaian yang sedemikian rupa maka dapat dilihat bahwa masihlah jauh kualitas pendidikan SMK di DIY ini, penelitian tersebut belum secara spesifik menyebutkan bagaimana kondisi jurusan-jurusan pertanian, tentunya sangat memprihatinkan jika melihat dari segi jumlah SMK Pertanian yang ada dibandingkan dengan SMK yang membuka jurusan non pertanian, dari data jumlah sekolah di DIY, menurut dokumen yang dapat diakses dilaman [dikpora.jogjaprovo.go.id](http://dikpora.jogjaprovo.go.id) terdapat 219 SMK dengan 12 di antaranya adalah SMK Pertanian (Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017)

Tidak terlepas dari konteks masalah kualitas yang dihadapi oleh SMK Pertanian, bahwa perlu adanya penelitian yang spesifik mengenai

ketercapaian kualitas SMK Pertanian dalam 8 standar pendidikan dengan instrumen yang teruji dari BSNP, dimungkinkan penelitian dapat merumuskan masalah yang nyata sedang dihadapi oleh SMK Pertanian dalam menghadapi tantangan krisis petani muda kini.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan salah satu penelitian kebijakan pada fase pengenalan situasi masalah, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif diskriptif.

### **Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini bertempat di 12 sekolah kejuruan bidang pertanian di Daerah Istimewa Yogyakarta. Waktu penelitian ini dimulai sejak bulan Januari 2020 hingga Agustus 2020

### **Populasi/Sampel Penelitian**

Populasi penelitian ini adalah seluruh SMK Pertanian diseluruh Daerah Istimewa Yogyakarta yang berjumlah 12 sekolah, sampel yang merupakan seluruh populasi karena hanya berjumlah kurang dari 30.

### **Teknik Pengumpulan Data**

penelitian ini menggunakan pendekatan pengumpulan data secara kuantitatif sebagai yang utama berikut adalah Angket/Kuisisioner, Penelitian ini menggunakan instrumen akreditasi SMK yang

diterbitkan oleh Badan Akreditasi Nasional pada tahun 2019 yang telah disahkan dalam Keputusan Menteri No. 241/P/2019.

### **Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik diskriptif berupa penyajian data dalam tabel dan diagram, perhitungan modus, median dan mean. Analisis data yang ditempuh adalah perhitungan penskoran dari butir instrumen yang telah dilakukan pengisian oleh sekolah.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peran SMK sebagai garda terdepan regenerasi petani muda tak dapat lagi dihiraukan, pasalnya perkembangan zaman dapat cenderung melemahkan maupun dapat cenderung menguatkan maupun melemahkan. Di Povinsi D.I Yogyakarta jumlah keseluruhan SMK adalah 220 dan hanya 12 SMK saja yang termasuk dalam rumpun agribisnis dan agroteknologi atau hanya sekitar 5,46 % saja dari jumlah keseluruhan, dan hanya sekitar 8,3 % saja jumlah guru di SMK pertanian dari total seluruh guru SMK di Povinsi D.I Yogyakarta, dan hanya sebesar 6,6 % saja siswa SMK pertanian dari seluruh siswa SMK di Povinsi D.I Yogyakarta. Dilihat dari perbandingan siswa dan guru atau sering disebut rasio guru dan murid maka perbandingannya adalah 1 : 12 yang mana secara ideal rasio guru

murid adalah 1 :20 hal ini menunjukkan rata rata dari pelaksanaan pembelajaran dari SMK pertanian dapat dikatakan tidak efektif. Pada tabel 04 jika dilihat dengan seksama terdapat beberapa sekolah yang memiliki rasio guru murid yang dapat dikatakan sangat rendah, seperti SMK YIPK Bantul memiliki rasio 1 : 0,8 atau dapat di bulatkan 1 : 1 atau dapat dilihat tanpa perbandingan jumlah siswa 6 orang dan guru 7 orang, hal ini dapat menjadi perhatian lebih pada analisis yang akan dilakukan berikutnya. Yang kedua adalah SMK Perkebunan MM 52 yang memiliki rasio sebesar

1 : 6 atau tanpa perbandingan sebanyak 90 siswa di ampu oleh 16 guru, yang ketiga adalah SMK 1 Tanjungsari dengan perbandingan 1 : 8 atau tanpa perbandingan 257 siswa diampu oleh 32 guru. Ketiga kasus di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan standar pendidikan di SMK pertanian masihlah belum berjalan dengan efektif, dan tentunya dapat saja mencakup berbagai pelaksanaan standar. juga menjadi perhatian lebih pada capaian yang diperoleh oleh ketiga sekolah terkait pula, tapi juga tidak mengesampingkan sekolah lain karena rata rata dari seluruh sekolah termasuk dalam rasio pelaksanaan yang tidak efektif.

Pembahasan capaian standar nasional pendidikan dari SMK pertanian perlu dilakukan secara menyeluruh, dengan melihat secara umum rata rata capaian per standar,

per sekolah dan lebih spesifik melihat skor per butir dari beberapa standar yang dipilih berdasarkan capaian umum standar nasional seluruh SMK pertanian di Provinsi D.I Yogyakarta. Pertama adalah melihat rata rata capaian 8 standar nasional pendidikan pada seluruh SMK pertanian. Pada gambar 02 rata rata capaian seluruh standar nasional pendidikan di seluruh SMK pertanian DIY adalah 73,71, yang mana belum mencapai kriteria yang ditentukan. Jika dilihat satu persatu standar Terdapat beberapa standar nasional pendidikan yang belum mencapai kriteria minimal yang ditetapkan pula. Pertama adalah pada suplemen yang hanya memiliki capaian angka 72.9, kedua adalah standar pendidik yang hanya mencapai angka 77.4, ketiga adalah standar sarana dan prasana yang hanya memiliki capaian dengan selisih sedikit dari kriteria minimal yang ditetapkan dengan capaian 80,7. Pada capaian tertinggi standar isi dan pengelolaan yang masing masing memiliki capaian sebesar 91,3 dan 91. dan sisanya terletak pada rentang nilai 81-90 yang dapat dilihat secara runtut standar proses, skl, pembiayaan, penilaian, dengan capaian secara runtut yaitu 82,6, 83,7, 87,5 dan 87,6. Jika dilihat dari rata rata capaian pada seluruh standar yaitu sebesar 83,9 maka telah melampaui kriteria minimal yang ditetapkan, tetapi masih menjadi perhatian lebih beberapa standar yang di bawah kriteria minimal dan beberapa standar yang hanya memiliki selisih sedikit dengan kriteria minimal.

Dapat dikatakan nilai rata rata capaian setiap sekolah dalam seluruh standar nasional pendidikan, maka terdapat satu sekolah yang belum mencapai kriteria minimum yaitu SMK YIPK Bantul dengan capaian 51,7 yang mana jaraknya sangat jauh dengan kriteria minimal, sehingga dapat menjadi perhatian lebih untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut dalam analisis capaian per sekolah, terendah kedua ditempati oleh SMK 1 Tanjungsari yang memiliki capaian 80,9 dan dapat dilihat secara jelas selisih capaian dengan kriteria minimal yang tidak jauh maka perlu dilakukan pula analisis yang mendalam pada pembahasan capaian per sekolah. Pada posisi tiga terbawah adalah SMK 1 Nanggulan dengan capaian 82,9 juga termasuk dalam capaian yang nilainya belum terpaut jauh dari kriteria minimal. Pada capaian dengan rentang nilai 83- 90 terdapat dua sekolah yaitu SMK 1 Pandak dan SMK Perkebunan MM 52 dengan besar capaian 89,3 dan 89. Pada posisi dua teratas adalah SMK Muh 1 Bambanglipuro dan SMK 1 Cangkringan dengan capaian 97,3 dan 95,9. Secara sederhana dapat dilihat bahwa terdapat kesenjangan yang terjadi antara beberapa sekolah, maka perlu analisis lebih lanjut akan hal ini.

Nilai capaian akhir berupa rata rata seluruh capaian standar nasional setiap sekolah sering disebut pula dengan nilai hasil akreditasi, dengan berbagai ketentuan yang di tetapkan tentang rentang nilai hasil akreditasi setiap sekolah. Hal ini menjadi peting dibahas karena terdapat perbedaan hasil yang diperoleh sekolah dari hasil akreditasi dengan nilai yang dapat diperkirakan oleh peneliti, tidak menampik pula terdapat penyederhanaan metode pengumpulan dan perhitungan hasil tetapi perkiraan hanya sebagai gambaran lain bahwa masih terjadi kesenjangan antar SMK dan masih rendahnya capaian hasil dari setiap sekolah dalam hal pemenuhan standar pendidikan, atau dapat dilihat sebagai perlunya perubahan dan pembaharuan dari setiap SMK pertanian. Jika dilihat pada Tabel 05 terdapat fakta yang menarik dari dua sekolah (SMK YIPK Bantul dan SMK 1 Tanjungsari) dengan capaian terendah yang mana nilai akhir akreditasi dua sekolah tersebut adalah E dan C yang pada data terakhir di data pokok pendidikan menunjukan akreditasi dua sekolah tersebut adalah Tidak Terakreditasi dan Akreditasi A. Hal ini satu sisi menunjukan penurunan yang drastis dan satu sisi menunjukan nilai sebenarnya capaian dari kedua sekolah, maka sangat relevan bila dilakukan pembahasan lebih dari dua sekolah tersebut. Fakta kedua adalah pada capaian yang diperoleh oleh

SMK Muh. 1 Bambanglipuro dengan capaian tertinggi jika dilihat pada Tabel 06 besaran prosentase jurusan pertanian dari sekolah tersebut hanyalah 10%, maka stau sisi hasil yang ada tidak dapat dikatakan sebagai representasi dari bagaimana keadaan sebenarnya dari keadaan pendidikan pertanian yang ada di jenjang tersebut. Fakta menarik ketiga jika dilihat Tabel 06 maka banyak dari sekolah pertanian yang membuka jurusan non pertanian di sekolah tersebut sehingga dapat pula dikatakan bahwa eksistensi jurusan pertanian bisa saja dapat tergeser dan tentunya hal ini menjadi sebuah potensi ancaman baru. Masih perlu studi lebih mendalam tentang beberapa hal di atas tapi sebagai perspektif lain dari hasil capaian standar nasional pendidikan masih perlu dimunculkan agar pembahasan dapat bertambah luas karena tidak dipandang dari satu perspektif tertentu.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Ketercapaian Standar Nasional Pendidikan pada SMK Pertanian di Provinsi D.I. Yogyakarta, maka dapat disimpulkan bahwa Capaian standar Isi sebesar 91,3 yang menunjukan telah melampaui kriteria minimal yang ditetapkan, Capaian standar Proses adalah 82,6 yang menunjukan telah

melampaui kriteria minimal yang ditetapkan, Capaian standar Kompetensi Lulusan adalah 83,7 yang menunjukkan telah melampaui kriteria minimal yang ditetapkan, Capaian standar Pendidik sebesar 77,4 yang menunjukkan belum melampaui kriteria minimal yang ditetapkan, Capaian standar Sarpras sebesar 80,7 yang menunjukkan telah melampaui kriteria minimal yang ditetapkan, Capaian standar Pengelolaan sebesar 91 yang menunjukkan telah melampaui kriteria minimal yang ditetapkan, Capaian standar Pembiayaan sebesar 87,6 yang menunjukkan telah melampaui kriteria minimal yang ditetapkan, Capaian standar Penilaian sebesar 87,6 yang menunjukkan telah melampaui kriteria minimal yang ditetapkan, Capaian Suplemen sebesar 72,9 yang menunjukkan belum melampaui kriteria minimal yang ditetapkan. Jadi masih terdapat dua standar nasional pendidikan yang masih belum mencapai kriteria minimal yang ditetapkan yaitu standar pendidik (77,4) dan suplemen (72,9). Jika dilihat dari capaian keseluruhan standar sebesar 83,9 maka dapat disimpulkan bahwa ketercapaian standar nasional pendidikan SMK Pertanian di Provinsi D.I. Yogyakarta telah melampaui kriteria minimal yang ditetapkan.

#### **SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Ketercapaian Standar Nasional Pendidikan pada SMK

Pertanian di Provinsi D.I. Yogyakarta, maka diajukan beberapa argumen saran guna perbaikan lebih lanjut kualitas pendidikan. Bagi pemerintah perlu diadakanya perubahan dan pengembangan yang tersusun secara rapih dan menyeluruh pada seluruh SMK Pertanian dalam bidang peningkatan dan akselerasi Standar Nasional Pendidikan. Mengingat masih terjadi kesenjangan yang nyata antar sekolah dan mangingat pula masalah yang terjadi disekolah sangat kompleks dilihat dari analisis butir instrumen yang telah dilakukan, Bagi sekolah perlu diadakan gerakan yang berinisiatif untuk meningkatkan capaian Standar Nasional Pendidikan dengan berbagai bentuk kegiatan saling bahu membahu antar sekolah yang telah baik capaiannya dan sekolah yang kurang baik capaiannya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Pembangunan Nasional. (2014). Analisis Rumah Tangga, Lahan, dan Usaha Pertanian di Indonesia : Sensus Pertanian 2013. Jakarta, Bapenas: Badan Pembangunana Nasional
- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. (2017). Daftar Smk Diy. Diakses Pada Tanggal 23 Desember 2019, dari <http://dikpora.jogjaprov.go.id/web/halaman/detail/daftar-nama-dan-alamat-sekolah>



- Mahudin, F. N., & Shabahati, I. (2017). Buletin APBN, November 2017 (Vol.2 Edisi 21). Jakarta : Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI.
- Widodo, H. (2015). Potret Pendidikan Di Indonesia Dan Kesiapannya Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia (Mea). *Cendekia*, 13(2), 294–307.
- Malik, A., Nyoto, A., dkk (2019). Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah. Jakarta: BAN-S/M.
- Midayanti, N. (2019). Keadaan Tenaga Kerja Indonesia Agustus 2019 (No.91/11/XXII, 05 November 2019). Jakarta : Badan Pusat Statistik
- Soeharto. (2012). Pencapaian Standar Nasional Pendidikan Di Sekolah Menengah Kejuruan Daerah Istimewa Yogyakarta. *Cakrawala Pendidikan*, 31(1), 23–37.
- Suratha, I. K. (2015). Krisis Petani Berdampak Pada Ketahanan Pangan Di Indonesia. *Media Komunikasi Geografi*, 16(1), 67–80.